

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengelolaan**

##### 1. Pengertian Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Nanang fattah (2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planing), pengorganisasian (organising), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan sistem. Oleh karena itu apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007).

Berdasarkan defenisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang di harapkan dan pengawasan yang dekat. Dekat evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan Negara. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pengertian Keuangan Negara dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka pengertian Keuangan Daerah dapat didefinisikan yaitu Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil berguna.

Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang

semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini.

Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat.

## **B. Kualitas Pelayanan**

### **1. Pengertian Kualitas**

Definisi kualitas seperti terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai tingkah baik buruknya sesuatu. Maka untuk mengetahui sesuatu setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam mengartikannya. Kualitas memiliki arti yang berbeda-beda tergantung penempatan kosakata yang digunakan atau tergantung istilah apa yang digunakan. Konsep kualitas itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran relative suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian.

Dalam perspektif TQM (Total Quality Management), kualitas dipandang secara luas, dimana tidak hanya aspek hasil saja yang ditekankan, melainkan juga meliputi proses lingkungan dan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Gotesch dan Davis bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk,

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan. Meskipun kata kualitas memiliki banyak definisi yang diterima secara universal.<sup>1</sup> Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

## 2. Pengertian Kualitas

Definisi kualitas seperti terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai tingkah baik buruknya sesuatu. Maka untuk mengetahui sesuatu setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam mengartikannya. Kualitas memiliki arti yang berbeda-beda tergantung penempatan kosakata yang digunakan atau tergantung istilah apa yang digunakan. Konsep kualitas itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran relative suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian.

Dalam perspektif TQM (Total Quality Management), kualitas dipandang secara luas, dimana tidak hanya aspek hasil saja yang ditekankan, melainkan juga meliputi proses lingkungan dan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Gotesch dan Davis bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan. Meskipun kata kualitas memiliki banyak definisi yang diterima secara

---

<sup>1</sup> Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (ed.), *Total Quality Management*, (Yogyakarta: Andi Ofsee, 1996), hal. 67

universal.<sup>2</sup> Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dalam dunia bisnis, bukan hanya produk/jasa yang di perhatikan. Dalam hal berbisnis kualitas pelayanan harus bisa diperhatikan juga. Karena kualitas pelayanan merupakan cara mempertahankan pelanggan. Dengan adanya kualitas, berarti perusahaan harus memenuhi harapan-harapan pelanggan dan memuaskan kebutuhan mereka.

Arti service (pelayanan) adalah suatu proses jasa yang dihasilkan dari empat proses input, yaitu: *people processing (consumer)*, *possession processing*, *mental stimulus processing*, and *information processing*. Sebagai suatu sistem, bisnis jasa merupakan kombinasi antara *service operating system*, *service delivery system* dan *service marketing system*. Yang mana pemasaran jasa lebih menekankan pada service delivery system yaitu bagaimana suatu perusahaan menyampaikan jasa kepada konsumen.<sup>3</sup>

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Menurut Edvarson kualitas adalah bagaimana cara untuk mencari tahu apa yang menciptakan nilai bagi konsumen dan perusahaan harus memberikan nilai tersebut. Oleh karena itu, kualitas pelayanan harus mendapat perhatian yang serius dari manajemen

---

<sup>2</sup> Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (ed.), *Total Quality Management*, (Yogyakarta: Andi Ofsee, 1996), hal. 67

<sup>3</sup> Dr. Muhammad Adam, *Manajemen Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal.

organisasi jasa. Untuk menetapkan kualitas pelayanan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi jasa, terlebih dahulu organisasi tersebut harus mempunyai tujuan yang jelas.

Menurut Goeth dan Davis yang bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.<sup>4</sup> Definisi mengenai kualitas pelayanan mungkin berbeda, namun secara khusus meliputi hal dalam menentukan apakah pelayanan yang dirasakan sesuai dengan harapan pelanggan. Pelanggan menilai kualitas pelayanan berdasarkan persepsi mereka dari hasil teknis yang diberikan yang merupakan proses dimana hasil disampaikan.

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi massa atau negara.<sup>5</sup>

Menurut Parasuraman dkk, kualitas pelayanan adalah sebagai pedoman dasar bagi pemasaran jasa, karena ini merupakan produk yang dipasarkan adalah suatu kinerja (yang berkualitas) dan kinerja juga yang akan dibeli oleh pelanggan. Oleh karena itu, kualitas kinerja pelayanan merupakan dasar bagi pemasaran jasa.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), hal.51

<sup>5</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal.208

<sup>6</sup> Dr. Muhammad Adam, S.E., M.B.A, Manajemen Pemasaran Jasa,(Bandung: Alfabeta, 2015) hal.10

### C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

#### 1. Pengertian BUMDes

Pengertian BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>7</sup> Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif diantaranya yaitu :

- a. Pembentukan BUMDes bersifat kondisional, yang membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar layak pembentukan.
- b. BUMDes merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, BUMDes dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh pemerintah Desa dan masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>7</sup> Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016), hal.11

- c. Mekanisme pembentukan BUMDes bersifat inklusif, deliberatif dan partisipatoris. Artinya BUMDes tidak cukup dibentuk oleh pemerintah desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional musyawarah desa juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam BUMDes, seperti halnya rapat anggota dalam koperasi.
- d. Pengelolaan BUMDes bersifat demokratis dan teknokratis..

BUMDes adalah sebuah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Dengan adanya kelembagaan petani dan ekonomi desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi desa dan dalam mengatur distribusi dari output tersebut.<sup>8</sup>

## 2. Landasan Hukum BUMDes

Dasar pembentukan BUMDes adalah UU No. 32 tahun 2004 pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik deesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa

---

<sup>8</sup> Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan untuk Agroindustri*, (Bogor: IPB Press, 2002), hal. 15

- b. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- c. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa bahkan membuat satu bab khusus mengenai BUMDES yaitu pada BAB X Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 87 yang berbunyi:<sup>9</sup>

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes
  - 2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
  - 3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, dan diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes.
3. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Tujuan pendirian BUMDes seperti yang terkandung dalam UU No.6 tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian desa

---

<sup>9</sup> Undang-undang Desa 2014 (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*), Fokus Media, Bandung, 2014), hal. 51

- b. Mengoptimalkan aset desa agar lebih bermanfaat untuk kesejahteraan desa
  - c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
  - d. Membuka sebuah lapangan pekerjaan
  - e. Mengembangkan rencana kerja sama antar desa dengan pihak ketiga
  - f. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa
  - g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
  - h. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki prinsip-prinsip yang penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar nantinya mampu dipahami dan dipandang dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Dan terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDes, sebagai berikut:

a) Kooperatif

Semua semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan sebuah kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha yang dilakukan

b) Partisipatif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes

c) Emansipasif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

d) Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus bisa di pertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.

e) Sustainable

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes

f) Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

## D. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

### 1. Pengertian Ekonomi Masyarakat

Secara bahasa ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga atau tata kehidupan perekonomian suatu negara. Sedangkan, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>10</sup> Ekonomi kerakyatan menurut Sarbini (Syahrir,1989), bukanlah suatu ideologi atau gagasan baru, tetapi sekedar percobaan rumusan interpretasi dan cita-cita pembangunan masyarakat adil dan makmur. Sedangkan, ekonomi kerakyatan bagi Emil -Salim (Swasono,1985), yang dikenal sebagai ekonomi Pancasila, adalah pembangunan ekonomi yang meletakkan masyarakat sebagai suatu kesatuan yang memegang peranan sentral dalam sistem ekonomi yang terdiri dari berbagai sub-sistem masyarakat yaitu, petani, nelayan, buruh, masyarakat penawar jasa, dan sebagainya. Masyarakat berbagai sub-sistem tersebut. Sebagian terbesar berada di pedesaan yang tidak tergolong sebagai kaum menengah.<sup>11</sup>

Ekonomi kerakyatan (Demokrasi ekonomi) adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua,

---

<sup>10</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekonomi%20kerakyatan> diakses pada tanggal 30 Mei 2021 pukul 17.00

<sup>11</sup> Syafaruddin Alwi, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, JEP Vol. 2 No. 2, 1997, hal. 168

untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (rakyat) dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian (Baswir, 1993).<sup>12</sup> Ekonomi Kerakyatan berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diartikan sebagai suatu upaya interpretasi dari pembangunan masyarakat adil dan makmur yang meletakkan masyarakat sebagai satu kesatuan pemegang peranan sentral dalam sistem ekonomi.

Demokrasi ekonomi seperti yang tertuang dalam GBHN 1993 menjelaskan bahwa rakyatlah yang bertindak aktif (berproduksi) dan pemerintah menciptakan iklim untuk mereka agar bertindak aktif dalam ekonomi. Dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi rakyat bagian masyarakat yang lebih kuat secara ekonomis, kuat dalam posisi kalembagaan organisasi sosial dan politik tentunya dapat pula bertindak secara fungsional segaris dengan peran pemerintah untuk menciptakan iklim yang mendorong pemberdayaan umat agar mampu menggunakan sumber daya yang tersedia untuk merubah nasib mereka.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mubyarto, dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014), hal.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 111

## 2. Indikator Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Indikator kesejahteraan di atas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebutuhan yang lainnya. Indikator tersebut diukur dari beberapa aspek diantaranya:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti halnya kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti halnya kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti halnya fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.<sup>14</sup>

### **E. Objek Wisata**

Objek wisata merupakan salah satu unsur penting dalam dunia kepariwisataan. Dimana objek wisata dapat menyukseskan program pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya bangsa sebagai asset yang dapat dijual kepada wisatawan. Objek wisata dapat berupa alam, budaya, tata hidup dan sebagainya yang memiliki daya tarik dan nilai jual untuk

---

<sup>14</sup> Rudy Badrudin, *Ekonometika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPPSTM YKPN, 2012), hal. 145.

dikunjungi ataupun dinikmati oleh wisatawan. Dalam arti luas, apa saja yang mempunyai daya tarik atau menarik wisatawan dapat disebut sebagai objek dan daya tarik wisata.

Wisata Menurut Mariotti menyatakan bahwa objek wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik bagi orang-orang yang mau datang berkunjung ke daerah tujuan wisata tersebut. Sedangkan menurut Marpaung menyatakan bahwa objek wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah. Demikian juga menurut SK Menparpostel No. KM 98 PW 102 MPPT-87 yaitu "Objek wisata adalah suatu tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya alam yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik yang diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan".<sup>15</sup>

Kemudian Gamal menyatakan bahwa objek wisata adalah potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Secara umum daya tarik suatu objek wisata berdasarkan pada : Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya, Adanya ciri khusus/ spesifikasi yang bersifat langka. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir, Objek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, fauna, hutan dan sebagainya.

---

<sup>15</sup> SM Situmorang, *Objek Wisata Kebun binatang Simalingkar B Dalam Kajian Sejarah Pariwisata* tahun 2005-2011, hal. 9

Sedangkan pengertian objek dan daya tarik wisata menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 yaitu yang menjadi sasaran perjalanan wisata yang meliputi :

- a. Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis, serta binatang-binatang langka.
- b. Karya manusia yang berwujud muscum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro (pertanian), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan.
- c. Sasaran wisata minat khusus, seperti : berburu, mendaki gunung, gua industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ziarah dan lain-lain. Jadi dari pengertian tersebut objek wisata daerah tirta (air) dapat dikatakan sebagai salah satu objek wisata alam di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo karena merupakan suatu tempat yang mempunyai daya tarik dari pesona keindahan alam yang sangat asri sehingga banyak wisatawan yang datang mengunjungi untuk menikmati keadaan dan panorama daerah tersebut.<sup>16</sup>

Pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Semua kegiatan pembangunan hotel, pemugaran obyek budaya, pembuatan pusat rekreasi, penyelenggaraan pekan pariwisata, penyediaan angkutan dan sebagainya semua itu dapat

---

<sup>16</sup> SM Situmorang, *Objek Wisata Kebun binatang Simalingkar B Dalam Kajian Sejarah Pariwisata* tahun 2005-2011, hal. 10

disebut kegiatan kepariwisataan sepanjang dengan kegiatan-kegiatan itu semua dapat diharapkan para wisatawan akan berdatangan. Disebut Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap ditempat yang didatanginya, atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya.<sup>17</sup>

Di dalam membina/meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang kepariwisataan dibutuhkan penyebarluasan berbagai pengertian yang berhubungan dengan segala macam/ bentuk per istilah yang sering digunakan dalam dunia kepariwisataan. Hal tersebut sangat penting sebagai sarana untuk menambah wawasan. Hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata tadi antara lain adalah pengertian mengenai apa itu pariwisata dan apa saja yang dibutuhkan para wisatawan. Hal ini penting mengingat bagaimanapun juga dengan semakin berkembangnya pariwisata Nasional maka masyarakat akan bersinggungan dengan dunia pariwisata dan sekaligus mendapat pelajaran tentang manfaat nya, baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut arti katanya, pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata pari dan kata wisata. Kata pari berarti penuh, seluruh, atau semua. Kata wisata berarti perjalanan. Menurut Yoeti syarat suatu perjalanan disebut sebagai perjalanan pariwisata apabila:

1. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain, di luar tempat kediaman orang tersebut biasa tinggal

---

<sup>17</sup> R.G Soekadijo, Anatomi Parawisata, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1996 ), hal.

2. Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang, dan tidak mencari nafkah ditempat atau negara yang dikunjunginya. Semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjungi

Menurut Wahab pariwisata mengandung tiga unsur, antara lain

- a) Manusia. Yakni unsur insani sebagai pelaku kegiatan pariwisata
- b) Tempat. Yakni unsur fisik yang sebenarnya tercakup oleh kegiatan itu sendiri
- c) Waktu. Yakni unsur tempo yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut dan selama berdiam di tempat tujuan.<sup>18</sup>

Jadi definisi pariwisata adalah salah satu dari industri baru yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam hal mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan Sementara menurut Spillane (1994) pariwisata adalah suatu jasa dan pelayanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, usaha pariwisata dibagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu: usaha jasa pariwisata, perusahaan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata.

## **F. Kuliner**

*Culinary* dalam bahasa Inggris berarti hal urusan dapur yang berkenaan dengan keahlian masak-memasak.<sup>19</sup> Dalam bahasa Indonesia

---

<sup>18</sup>Siti Munawaroh, Dkk, *Peranan Kebudayaan Daerah dalam Perwujudan Masyarakat Industri Pariwisata*, ( Yogyakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999 ), hal. 52-54

diistilahkan dengan kata kuliner. Pusat kuliner merupakan tempat makan dengan banyak stand makanan. Pengunjung bebas memilih, baik makanan maupun tempat makannya. Tata ruang dalam pada Pusat Kuliner setara dengan *food court*. *Food court* adalah suatu tempat makan dengan *counter-counter* yang terdiri dari berbagai penjual makanan serta disediakan suatu area umum untuk *self-serve dining*.

Perabot untuk keperluan *food court* harus praktis, nyaman dipakai serta sedap dipandang. Untuk tiap outlet atau bagian dari ruang makan sengaja dibuat berbeda, sesekali perlu diubah susunannya untuk mengubah atmosfer atau suasana agar tidak membosankan dan selalu menarik. Material bangunan yang umum digunakan dalam *food court* adalah ubin, *formica*, baja tahan karat, dan gelas/kaca. Semua bahan ini merupakan bahan yang mudah dibersihkan.

Pada tempat makan dengan model *food courts* pada umumnya memiliki permasalahan yaitu ketika pemesan makanan telah mendapatkan nomor meja dan duduk menunggu di tempat yang dipilih, pelayan yang mengantar pesanan makanan kebingungan mencari posisi pemesan makanan. Kejelasan di sini menjadi penting untuk diterapkan dalam tata ruang makan untuk dijadikan patokan ketika seseorang memesan makanan dan menunjukkan tempat yang dipilih kepada pelayan. Untuk meningkatkan kejelasan suatu tempat dapat dilakukan dengan membuat

---

<sup>19</sup> Chambers-Essential English Dictionary. Chambers Harrap Publishers Ltd. : 1995

variasi-variasi bentuk yang kemudian dapat dijadikan patokan bagi pemesan makanan dan pelayan yang bertugas mengantar pesanan.

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disini memuat berbagai penelitian yang sebelumnya telah diteliti oleh peneliti lain dalam bentuk jurnal ataupun skripsi. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang terdahulu menjadi dasar pemikiran penulis dalam hal menyusun proposal. Berikut penelitian yang terdahulu diantaranya:

1. Sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Robiatul Adawiyah dalam jurnal dengan judul Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo).<sup>20</sup>

Berikut hasil penelitiannya menunjukkan bahwasannya:

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis persamaan regresi berganda (*multiple regression*) menunjukkan bahwa Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo) telah melaksanakan pengembangan organisasi dengan sangat baik dengan didukung adanya aspek modal sosial. Modal sosial menjadi aspek yang sangat penting dalam kegiatan pengembangan organisasi karena memiliki hubungan yang

---

<sup>20</sup> Adawiyah, *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahter Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)*, Jurnal Fisip Airlangga, 2018, hal. 1

erat kaitannya dengan masyarakat. Terutama diberbagai kegiatan yang ada di BUMDes Surya Sejahtera. Tanpa adanya modal sosial yang ditanamkan maka tidak akan terjalin hubungan yang baik antara pengurus dengan masyarakat Desa Kedungturi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Elsa Tomsia dan M. Syafitri dalam jurnal dengan judul Pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.<sup>21</sup>

Hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Sukajadi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Badan Usaha Milik Desa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli desa, dengan persentase pengaruh sebesar 22%, sedangkan sisanya sebesar 78% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti Anggaran Dana Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dana Community Development.

3. Dicky Prasetyo Syafitri dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Kebijakan BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Pedesaan Di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Elsa Tomsia dan M. Syafitri, *Pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis*, E-Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2020, Vol.09, No.1, hal. 91-101

<sup>22</sup> Dicky Prasetyo, *Pengaruh Kebijakan BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Pedesaan Di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang*, skripsi, Sumatera Utara: UMSU, hal.89

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan BUMDes terhadap pengembangan ekonomi pedesaan di Kecamatan Beringin adalah 4 (empat) faktor yaitu sosialisasi BUMDes, Pembentukan BUMDes, Keterlibatan Masyarakat dengan BUMDes, dan Peran BUMDes. Berdasarkan dari hasil analisa faktor yang ditunjukkan dari nilai Variance adalah Sosialisasi BUMDes faktor yang tertinggi dengan nilai 11,87%, sedangkan keterlibatan masyarakat dan peran BUMDes hanya 2,76% dan 1,85%. Hal ini dinyatakan bahwa pemerintah desa lebih banyak melakukan sosialisasi BUMDes dan pembentukan BUMDes tetapi keterlibatan masyarakat dan peran BUMDes di desa belum dilaksanakan secara maksimal

4. Wahyu Aditya dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.<sup>23</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan badan usaha milik desa ini disambut baik demi untuk mencapai kesejahteraan desa, pengembangan desa dan pendapatan asli desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa. Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja.

---

<sup>23</sup> Wahyu aditya, *Pengaruh Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Pematang Rahim Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur*, Skripsi, Jambi:UIN Sutha Jambi.hal.23

5. Yoga Saputra, dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Ijen Lestari terhadap Tingkat Perekonomian Masyarakat Desa Taman Sari Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh setelah adanya BUMDes terhadap perekonomian masyarakat Desa Tamansari, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BUMDes, pemberdayaan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan UMKM. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode snowball. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BUMDes berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa.

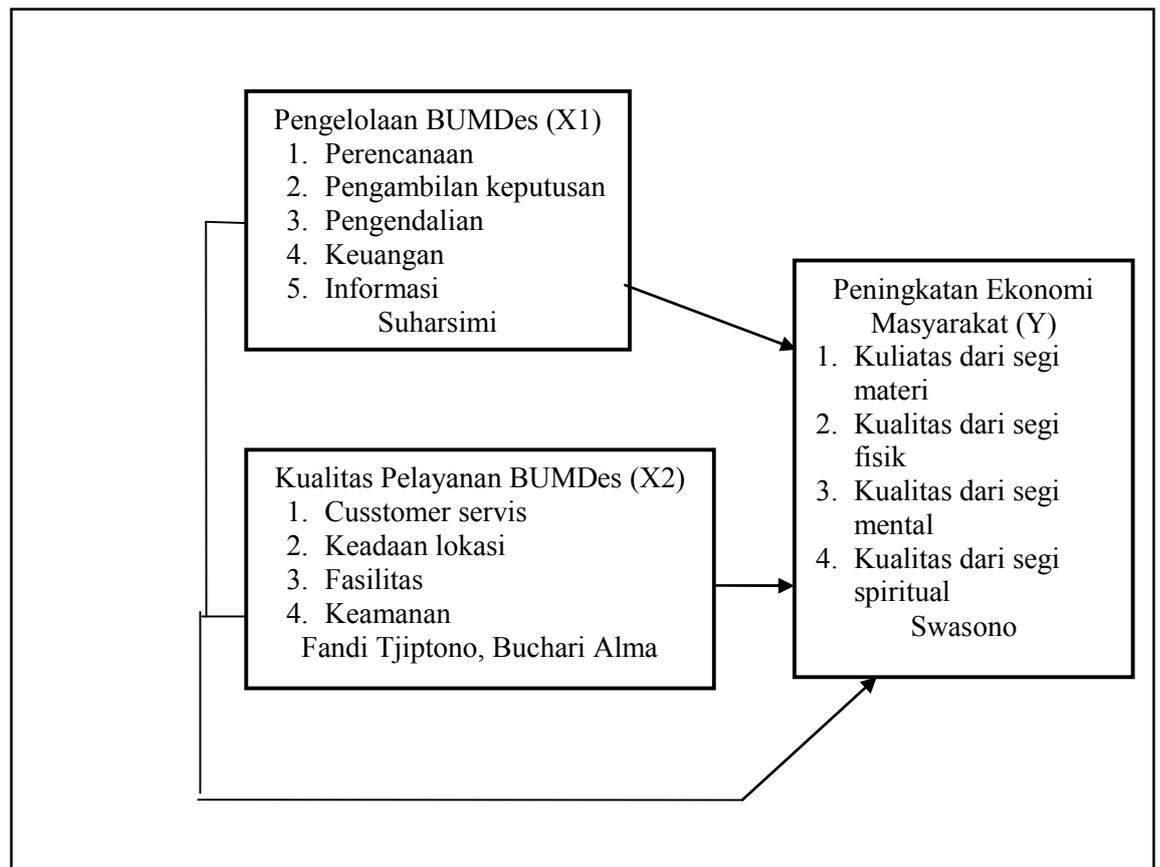
## H. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemikiran tersebut perlu diteliti pengelolaan BUMDes yang telah diberikan di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dengan menganalisis secara deskripsi kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, sustainabel. Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat desa memiliki BUMDes dengan menganalisis pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja masyarakat desa dengan adanya BUMDes, sehingga pengembangan ekonomi masyarakat Desa Punjul di Kecamatan Sendang

---

<sup>24</sup> Yoga Saputra, *Pengaruh Badan Usaha Milik Desa ijen lestari terhadap tingkat perekonomian masyarakat desa taman sari kecamatan licin kabupaten banyuwangi*, Skripsi, Jember: Universitas Jember.hlm.57

Kabupaten Tulungagung dapat tercapai dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, hal ini dapat dilihat pada Kerangka Konseptual.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

## I. Hipotesis

Berdasarkan kajian yang terpaparkan diatas dapat dirumuskan beberapa hipotesis terkait penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pengaruh pengelolaan BUMDes terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Punjul

2. Terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Punjul
3. Terdapat pengaruh pengelolaan dan kualitas pelayanan BUMDes secara bersama-sama terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa Punjul